

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan yang besar dalam mencapai pembangunan manusia yang merata di seluruh wilayah. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tujuan utama bagi negara berkembang. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia emas tahun 2045 yang dibangun 4 pilar pencapaian yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945, terdiri dari: (1) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) Pemerataan pembangunan; (4) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan, melainkan perlu kita lihat juga dari aspek-aspek kehidupan dasar sehingga hal ini menjadi cikal bakal munculnya IPM (Putri & Muljaningsih, 2022).

Paradigma pembangunan kini telah berubah, yang semula berfokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi berpusat pada kesejahteraan manusia, pembangunan manusia kini dianggap sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara, untuk mengukur kualitas hidup manusia digunakan IPM yang berfungsi untuk menentukan peringkat atau tingkat kemajuan suatu wilayah (Jean & Mongan, 2019).

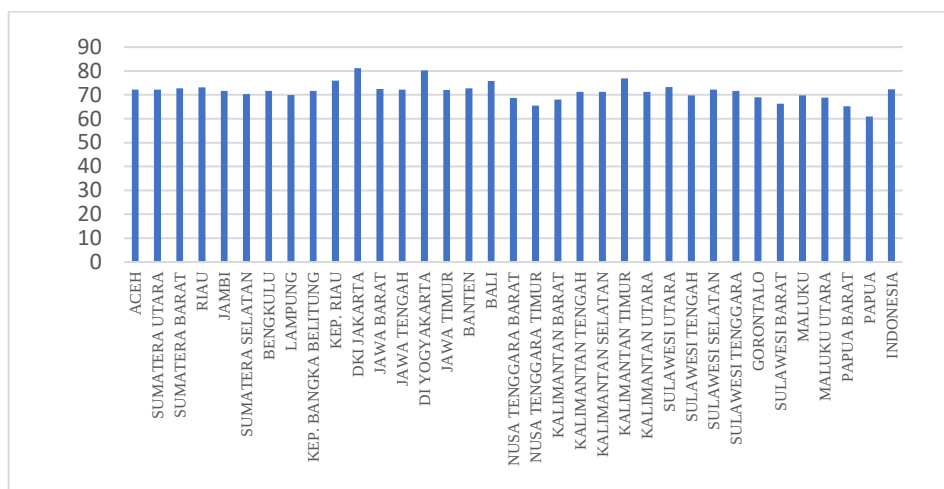
Menurut Angkat (2023) Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan di suatu wilayah, IPM diperkenalkan pada tahun 1990 oleh program

pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam *Human Development Report*.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia yaitu dengan indikator kesehatan, indikator tingkat pendidikan dan indikator ekonomi, dimana indikator kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, indikator pendidikan diukur dengan angka melek dan rata-rata lama sekolah dan indikator ekonomi diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok berdasarkan rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (Fibriyani et al., n.d.).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2016, status IPM Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Meskipun pada saat pandemi Covid-19 IPM Indonesia mengalami perlambatan, akan tetapi setelah itu IPM menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi (Sari & Warsitasari, 2023).

Menurut Priandini & Intisari (2019) IPM tertinggi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pencapaian terendah adalah Provinsi Papua, hal ini dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut ini yang menunjukkan bahwa kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan IPM kawasan Indonesia Timur pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah gambar rata-rata Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.



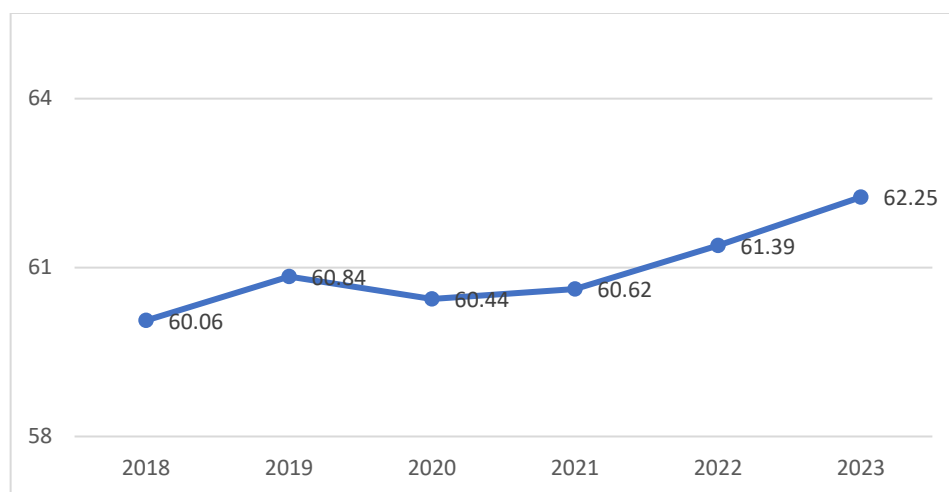
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

**Gambar 1.1 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
Tahun 2018-2023 (persen)**

Indonesia dengan wilayah geografis yang luas dan kondisi demografi yang beragam, perbedaan tingkat pembangunan manusia antar wilayah sering kali terlihat signifikan. Ketidakmerataan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, yang akhirnya mempengaruhi stabilitas pertumbuhan nasional.

Berdasarkan gambar 1.1, merupakan nilai rata-rata IPM di Indonesia per provinsi. IPM Indonesia mengalami kenaikan dengan rata-rata 0,72% per tahun. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2019 yang disebabkan oleh Covid-19, di tahun 2021 IPM mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi. DKI Jakarta menjadi peringkat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain dikarenakan DKI Jakarta menduduki predikat sebagai kota paling maju nomor satu di Indonesia (Isnaini & Sasana, 2022) dengan nilai rata-rata 81,20%.

Di sisi lain, dalam gambar 1.1 di atas, Provinsi Papua menjadi urutan terendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua 60,06% pada tahun 2018 dan 62,25% pada tahun 2023. Berikut ini adalah gambar data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua dari tahun 2018-2023.



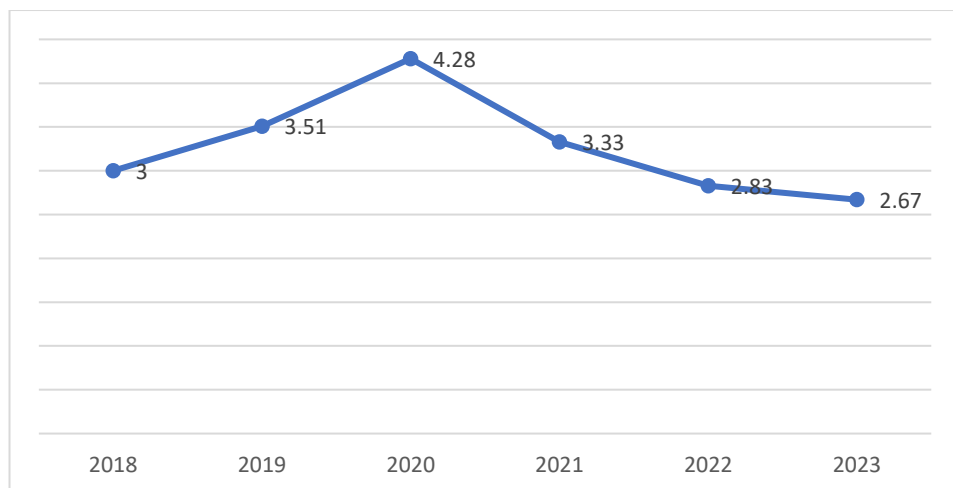
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Provinsi Papua dari tahun 2018 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,7% yang disebabkan oleh covid-19. Meskipun beberapa tahun terjadi peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia, namun kenyataannya nilai IPM di Provinsi Papua masih belum stabil dan tetap berada di bawah nilai IPM Nasional sehingga masih belum cukup untuk mengangkat Provinsi Papua dari posisi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia (Suhendi & Astuti, 2023).

Provinsi Papua kaya akan Sumber Daya Alam yakni tembaga, emas, dan perak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Provinsi Papua menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi (Suhendi & Astuti, 2023).

Pada umumnya, pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk atau jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Namun, pengangguran di Papua disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, hingga tantangan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai. Berikut ini adalah gambar data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua dari tahun 2018-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

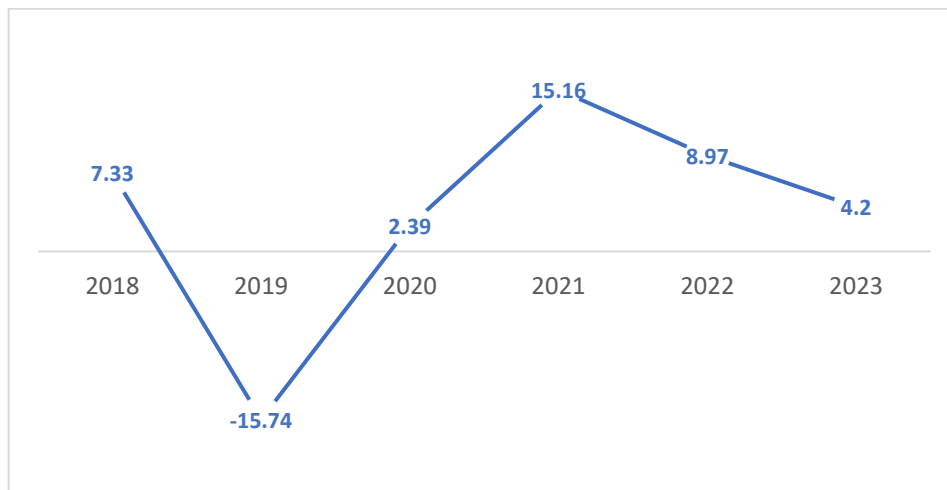
Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan dan

perubahan naik turun setiap tahun nya. Dari tahun 2018 sampai 2020 persentase TPT terus mengalami peningkatan, dilihat dari grafik di tahun 2018 persentase tingkat pengangguran mencapai 3% dan di tahun 2020 persentase tingkat pengangguran mulai melonjak tinggi mencapai 4,28% jumlah ini naik 1,28% dari tahun 2018. Naiknya TPT ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dampak dari adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan berbagai perusahaan di Indonesia secara bersamaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga tingkat pengangguran meningkat signifikan dan UMKM pun tidak bisa berjualan dikarenakan adanya *lockdown*. Hal ini di dukung oleh laporan dari BPS Provinsi Papua tahun 2019-2020 (Mifrahi & Darmawan, 2022). Pasca Covid-19, TPT mengalami penurunan hingga 1,61% sehingga di tahun 2023, tingkat pengangguran bernilai 2,67% lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Papua sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. (Naibaho et al., 2021). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Perubahan dalam PDRB baik berupa kenaikan maupun penurunan, mencerminkan perubahan pada jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut, PDRB juga merepresentasikan pendapatan yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu, semakin tinggi angka PDRB di suatu daerah, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh wilayah tersebut, sehingga tingkat PDRB yang tinggi bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat

secara umum (Komang & Ida, 2024). Berikut ini adalah gambar data Pertumbuhan Ekonomi menggunakan PDRB dalam harga Konstan Provinsi Papua dari tahun 2018-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data di olah.

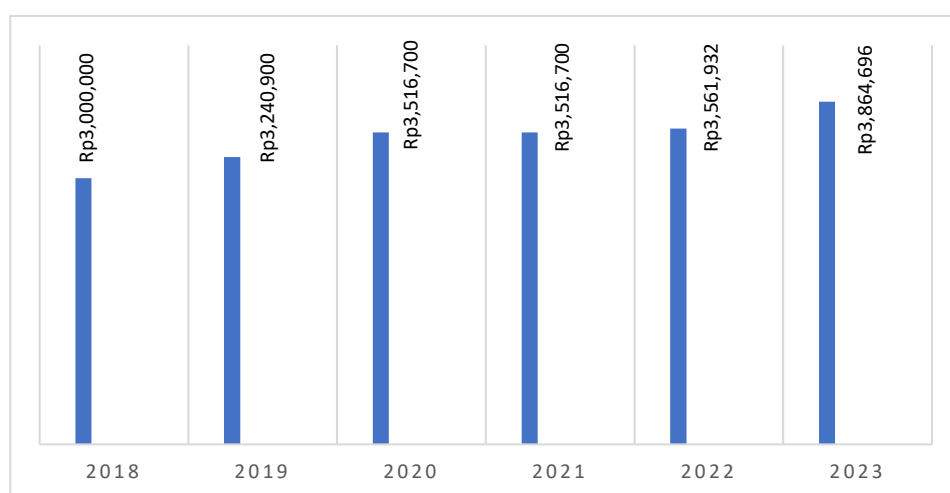
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Persen)

Sektor pertambangan menjadi sumber penyumbang PDRB di Provinsi Papua, dikarenakan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua sangat melimpah, terutama dalam pertambangan karena Papua memiliki cadangan tembaga serta emas yang melimpah yang di eksplorasi oleh PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mengalami fluktuasi sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi turun secara drastis sebesar -15,72%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 ekonomi Papua mengalami kontraksi besar yang disebabkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun. Diluar dari sisi lapangan usaha, penurunan itu disebabkan oleh dampak dari covid-19. Pasca covid perekonomian Papua kembali pulih sehingga pada tahun

2021 persentase ekonomi Papua mencapai 15,16%. Kenaikan ini disebabkan oleh sektor pertambangan, penggalian dan komponen ekspor luar negeri. Namun kenaikan tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 8,97% (turun 6,19% dari tahun sebelumnya). Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka pertumbuhan hanya 4,2% (turun 4,77%). Secara keseluruhan, fluktuasi ekonomi Papua mencerminkan sensitivitasnya terhadap sektor-sektor utama seperti pertambangan serta pengaruh faktor eksternal seperti pandemi.

Dalam konteks upah minimum, menurut Komang & Ida (2024) upah memegang peran penting dalam mendukung proses pembangunan. Ketika upah ditingkatkan, pendapatan pekerja akan meningkat sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi oleh pekerja, dapat yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Berikut ini adalah gambar data Upah Minimum Provinsi Papua dari tahun 2018-2023.



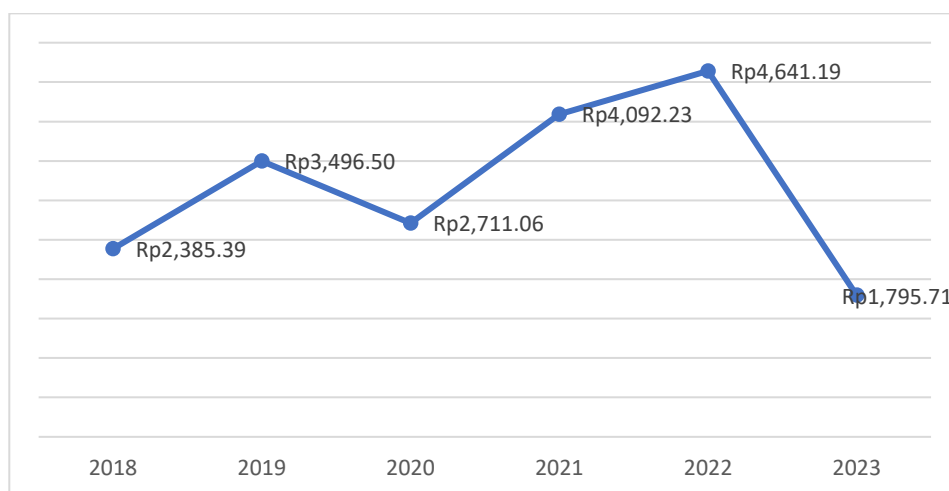
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

Gambar 1.5 Upah Minimum Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah).

Berdasarkan gambar 1.5, jumlah Upah Minimum Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Meskipun di tahun 2020-2021 Upah Minimum Provinsi mengalami perlambatan, namun di tahun 2022-2023 meningkat sebesar Rp 347.996. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan IPM yaitu melalui kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dikarenakan apabila upah tenaga kerja mengalami peningkatan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui pendapatan yang diterima sehingga indikator pembangunan manusia yaitu standar kualitas hidup layak dapat terpenuhi (M Sanggelorang et al., 2015). Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan UMP tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Upah Minimum yang tidak memadai memiliki dampak terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena upah minimum yang mereka terima tidak mencukupi sehingga masyarakat mengalami kesulitan (Jati et al., 2024).

Menurut Sengka et al., (2020) Pembangunan daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Menurut Blakely dalam Kuncoro, (2004) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. PAD merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, penerimaan keuangan daerah bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Kemakmuran atau

kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas (Sahlan et al., 2022). Berikut ini adalah gambar data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua dari tahun 2018-2023.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Gambar 1.6 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.6 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Fenomena fluktuasi tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, dimulai dari pandemi Covid-19 dan pemekaran Provinsi Papua yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Pengalokasian dana pendapatan daerah yang sesuai dengan kegunaannya tentu akan mempengaruhi dan meningkatkan IPM pada setiap daerah, hal tersebut disebabkan karena apabila PAD lebih banyak digunakan untuk belanja daerah baik belanja modal maupun belanja rutin maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulastri & Efendri, 2015). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2011-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2011-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2011-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2011-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2011-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, sebagai kegunaan pengembangan ilmu dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Papua. Selain itu, diharapkan dapat digunakan pemerintah ataupun instansi terkait agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Papua.
3. Bagi fakultas, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat digunakan sebagai acuan informasi dan acuan untuk menambah informasi yang lebih baru lagi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DPJK Kementerian Keuangan Provinsi Papua.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dengan perkiraan bulan Agustus 2024 sampai bulan April 2025 dengan alokasi sebagai berikut :